AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi
Volume 15, Nomor 1, hlm 26-31
Mei – Agustus 2024
P-ISSN 2086-4159
E-ISSN 2656-6648

http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

TINJAUAN ATAS REALISASI BELANJA PADA DIT BINMAS POLDA JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

Iseu Anggraeni
e-mail : iseuanggraeni@unibba.ac.id

Wulan Risnawati
e-mail : wulanrisnawati51@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Realisasi Belanja Pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023. Dit Binmas Polda Jawa Barat merupakan salah satu satuan kerja di Polda Jawa Barat yang bertugas untuk membina dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Realisasi belanja merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran. Realisasi belanja yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, realisasi belanja yang rendah menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan belum dimanfaatkan secara optimal. Setiap tahapan dalam realisasi belanja berjalan dengan teratur, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Kebijakan dalam penyusunan anggaran belanja Dit Binmas Polda Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi pengguna alokasi anggaran.

Kata Kunci : Realisasi Belanja

I. PENDAHULUAN

Anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematis yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran. Dalam sebuah organisasi anggaran memegang peranan yang sangat penting karena anggaran mengarahkan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengalokasi sumber daya secara tepat. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap satuan kerja yang menggunakan anggaran tersebut. Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran.

Anggaran sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Melalui penerapan *good governance* yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Realisasi belanja merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran. Realisasi belanja yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, realisasi belanja yang rendah menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dit Binmas Polda Jawa Barat merupakan salah satu satuan kerja di Polda Jawa Barat yang bertugas untuk membina dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Binmas Polda Jawa Barat membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan, khususnya mengenai anggaran belanja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dit Binmas Polda Jawa Barat, realisasi belanja pada triwulan II tahun anggaran 2023 masih rendah. Realisasi belanja Dit Binmas pada triwulan II tahun anggaran 2023 hanya mencapai 44,77% dari anggaran yang telah dialokasikan. Menurut kebijakan Menteri Keuangan, realisasi belanja pada triwulan II seharusnya mencapai 50% dari anggaran yang telah dialokasikan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) realisasi belanja pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023
2. Bagaimana realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023
3. Apa saja hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengetahui realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
3. Untuk mengetahui hambatan penyebab kurang optimalnya realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Laksmi (2011:8) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya.

Adapun Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Arnani.P Adalah :

a. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja.
b. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi.
c. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja.
d. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
e. Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
f. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
g. Mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya.
h. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin.

i. Untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.
j. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja.

2.2 Pengertian Realisasi Belanja

Menurut Richard Musgrave, salah satu konsep utama Musgrave adalah konsep *"triple fiscal dividend"* yang menekankan pentingnya realisasi belanja dalam mencapai tujuan ekonomi, distribusi, dan alokasi. Musgrave mengakui peran tujuan ekonomi dalam menjaga stabilitas ekonomi, realisasi belanja dapat diarahkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengurangi dampak resesi. Juga menekankan peran realisasi belanja dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan, realisasi belanja juga menciptakan keadilan sosial. Kemudian menurut Musgrave realisasi belanja harus digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar mencapai efisiensi ekonomi. Ini berarti instansi harus memastikan bahwa pengeluarannya menghasilkan manfaat yang maksimal.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
   Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
   Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Dari hasil perhitungan realisasi dan pembelanjaan dana pada Dit Binmas Polda Jawa Barat telah melakukan efisiensi belanja pada triwulan II Tahun Anggaran 2023 hanya saja perlu ditingkatkan kembali. Bahwa alokasi belanja yang telah dianggarkan pada triwulan I sebesar Rp. 12.402.926.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.182.914.976,- dengan presentase 17,60% dan triwulan II alokasi belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 12.402.926.000,- yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 5.552.935.744,- dengan presentase 44,77%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Realisasi Belanja di Direktorat Pembinaan Masyarakat

Standar Operasional Prosedur (SOP) realisasi belanja adalah dokumen yang merinci langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengeluaran atau belanja oleh suatu organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam realisasi belanja berjalan dengan teratur, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dit Binmas Polda Jawa Barat dalam mewujudkan realisasi belanja terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subdit (Subbagian Direktorat)
   Dari subdit mengajukan anggaran yang mencakup kebutuhan belanja yang terkait dengan kebutuhan setiap subdit berupa nota dinas, kemudian di acc oleh pimpinan dan diajukan ke bendahara pengeluaran.
2. Penyedia barang/jasa
   Pada penyedia barang/jasa berupa tagihan yang disertai dengan bukti pendukung, bukti perjanjian/kontrak, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa, berita acara penyelesaian pekerjaan,

berita acara serah terima pekerjaan/barang, bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan, berita acara pembayaran, kuintasi, faktur pajak beserta SSP, jaminan bank, dan dokumen lain.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
   Pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa tagihan yang dilakukan pengujian, pengujian tersebut diantaranya:
   a. Kebenaran perhitungan
   b. Kebenaran data pihak yang berhak menerima kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang yang diterima dengan kontrak
   c. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
4. Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar)
   Pada Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) berupa SPM yang kemudian dilakukan pengujian, pengujian tersebut diantaranya:
   a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP
   b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen PPK
   c. Kebenaran pengisian SPP
   d. Kesesuaian kode BAS
   e. Ketersediaan PAGU
   f. Kebenaran formal dokumen pendukung
   g. Kebenaran pihak yang berhak menerima
   h. Kebenaran perhitungan tagihan dan kewajiban perpajakan
   i. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
   j. Kesesuaian prestasi pekerjaan
5. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
   Pada KPPN berupa SPM yang dilakukan pengujian, pengujian tersebut diantaranya:
   a. Menguji kebenaran perhitungan angka yang tercantum dalam SPM
   b. Menguji ketersediaan dana
   c. Menguji kesesuaian tagihan dengan data kontrak
   d. Menguji persyaratan pencairan dana
   e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak dalam SPM dengan SSP

Dari KPPN terbitlah SP2D yang kemudian dibayarkan dan masuk ke rekening bank pihak penerima. Setelah itu, setiap subdit membuat pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran kas untuk nantinya dilaporkan.

4.2.1 Realisasi Belanja Triwulan II Pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

Pada Dit Binmas Polda Jawa Barat, susunan atau struktur belanja meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Kebijakan dalam penyusunan anggaran belanja Dit Binmas Polda Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi pengguna alokasi anggaran dimaksud serta memprioritaskan hal sebagai berikut:

1. Anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Dit Binmas Polda Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan penyelenggaraan fungsi kewenangan program.
2. Belanja anggaran berdasarkan standar harga dan tolak ukur kinerja.
3. Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai.
4. Belanja langsung yang meliputi belanja barang.

Berikut ini disajikan mengenai anggaran dan realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang
Triwulan II TA. 2023

Triwulan	Keterangan		
	PAGU Belanja (Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	Selisih
Triwulan I	12.402.926.000	2.182.914.976	10.220.011.024
Triwulan II	12.402.926.000	5.552.935.744	6.849.990.256

Sumber: Direktorat Pembinaan Masyarakat

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada triwulan I alokasi belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 12.402.926.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.182.914.976,- (17,60%), dan triwulan II alokasi belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 12.402.926.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.552.935.744,- (44,77%) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Jadi Dit Binmas Polda Jawa Barat masih dapat mengendalikan anggaran belanja karena belanja yang dilakukan tidak melebihi target yang ditetapkan. Tetapi, Dit Binmas Polda Jawa Barat hanya perlu menaikkan target anggaran belanja sehingga dapat memenuhi kebijakan Menteri Keuangan yang dimana pada triwulan II target capaian anggaran belanja adalah 50%.

4.2.1 Hambatan yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Realisasi Belanja Triwulan II pada Dit Binmas Polda Jawa Barat TA. 2023

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan setiap subdit Anggaran dibutuhkan oleh setiap subdit, sehingga setiap subdit harus mengajukan terlebih dahulu ke bendahara pengeluaran ketika akan menggunakan anggaran. Tetapi, dari setiap subdit hanya akan mengajukan ketika mereka membutuhkannya, jika tidak ada yang dibutuhkan maka tidak akan ada anggaran yang terealisasi.
2. Ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan
   Terkadang, perencanaan belanja tidak sesuai dengan kebutuhan nyata atau tidak dapat dijalankan dengan efektif, sehingga menghambat realisasi belanja.
3. Perubahan kebijakan
   Perubahan kebijakan yang sering atau mendadak dapat mengganggu realisasi belanja yang telah direncanakan sebelumya.
4. Masih kurang baiknya sumber daya
   Sumber daya manusia di Dit Binmas Polda Jawa Barat sudah memenuhi secara kuantitas maupun kualitas. Seiring berkembangnya zaman serta diimbangi dengan kemajuan IPTEK, Dit Binmas juga patut mengikuti perkembangan yang ada. Pada pelaksanaan penyelenggaraan Dit Binmas selalu berupaya mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena alasan diatas, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal mengingat masih banyak yang belum mampu mengikuti kemajuan IPTEK yang ada. Sumber daya manusia yang masih didominasi oleh kalangan 40 tahun keatas dan lemah atas pelaksanaan IPTEK. Oleh karena kalimat diatas, masih banyak ditemukan kinerja yang belum maksimal mengingat sudah lumrahnya digitalisasi.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dit Binmas Polda Jawa Barat dalam mewujudkan realisasi belanja terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu: dari setiap subdit mengajukan anggaran kemudian di acc oleh pimpinan dan diajukan ke bendahara pengeluaran, kemudian dari penyedia barang dan jasa berupa tagihan yang diproses menjadi SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diproses kembali menjadi SPM oleh Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diproses oleh KPPN yang kemudian menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dibayarkan dan masuk ke rekening bank pihak penerima.
2. Pada Dit Binmas Polda Jawa Barat terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan menyebabkan kurang optimalnya realisasi belanja triwulan II pada Dit Binmas Polda Ja wa Barat Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan setiap subdit, ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan, perubahan kebijakan, dan masih kurang baiknya sumber daya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam melaksanakan tugas harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan prinsip-prinsip organisasi berupa: koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Satuan Kerja di Dit Binmas.
2. Aspek sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting, untuk itu kemampuan dan keahlian serta pengembangan sumber daya yang ada perlu ditingkatkan untuk tercapainya target kinerja kegiatan Dit Binmas Polda Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Kustiyahningsih dan Anamisa (2011:8). “Bab II Landasan Teori.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

Program, Accounting. “EVALUASI REALISASI ANGGARAN DI BIDANG” 6, no. 2 (2019): 196–207.

Sinaga, Edward James, Balitbang Hukum, Kementerian Hukum, Jl H R Rasuna, Said Kav, and Jakarta Selatan. “Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran” 5 (2016).

Yuliarti, Yuliarti. “Realisasi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat.” *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (2020): 136. https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.253.

Nurhayati, Siti. 2019. Tinjauan Atas Realisasi Belanja pada Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023.